

DAFTAR ISI

BAGIAN 1

Otonomi Daerah dari Era Orde Baru Hingga Reformasi

1 Otonomi Daerah di Masa Orde Baru: Pembangunan di Daerah 1

- Ide Dasar Desentralisasi 3
- Sejarah Desentralisasi Indonesia 5
- Sistem Hubungan Keuangan Pusat-Daerah 7
- Ketergantungan Fiskal 9
 - Rendahnya PAD 9
 - Dominannya Transfer dari Pusat 12
- Penyebab Ketergantungan Fiskal 13
- Rangkuman 15

2 Format Baru Otonomi Daerah: Menuju Daerah Membangun? 19

- Pendekatan *Big Bang* Atau *Zig-Zag*? 20
- Reformasi Sistem Pemerintahan 23
- Reformasi Sistem Pemerintahan Daerah 25
- Pembangunan di Daerah vs Daerah Membangun 37
- Rangkuman 39

3 Reformasi Desentralisasi Fiskal 44

- Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah 45
- Desentralisasi Fiskal 46
 - Konteks Perundang-undangan 46
 - Prinsip Desentralisasi Fiskal 49
- Arah Kebijakan Fiskal 52
- Dana Perimbangan 58
 - Dana Bagi Hasil 58
 - Dana Alokasi Umum 63
 - Dana Alokasi Khusus 70
 - Pinjaman Daerah 73
- Rangkuman 76

BAGIAN 2

Perencanaan Daerah di Era Otonomi

4 Perencanaan Pembangunan Daerah 81

- Pokok Perencanaan Pembangunan Daerah 81
- Tahap-Tahap Perencanaan Pembangunan Daerah 83
- Sumberdaya Perencanaan untuk Pembangunan Daerah 87
 - Lingkungan Fisik sebagai Sumberdaya Perencanaan 87
 - Lingkungan Regulasi sebagai Sumberdaya Perencanaan 87
 - Lingkungan Attitudinal sebagai Sumberdaya Perencanaan 89
- Prosedur Perencanaan di Era Otonomi 95
 - Pendekatan *Top-Down* vs *Bottom Up* 95
- Proses Perencanaan di Indonesia Pasca UU No. 25/2005 99
- Permasalahan dalam Implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah 102
- Rangkuman 103

5 Merumuskan Visi dan Misi 107

- Evolusi Makna Pembangunan 108
 - Definisi 108
 - Pergeseran Makna Pembangunan 109
- Membangun Visi 111
 - Ideologi Inti 112
 - Nilai Inti 112
 - Tujuan Inti 112
 - Menemukan Ideologi Inti 113
 - Menggambarkan Masa Depan 113
- Tahapan Penyusunan Renstra 115
- Contoh Visi dan Misi 117
 - Kasus Jawa Timur 120
 - Kasus Jogja Incorporated 124
- Rangkuman 127

6

Transformasi Ekonomi Daerah dari Berbasis Tambang Menuju Ekonomi Kerakyatan: Kasus Kabupaten Kutai Timur 133

- **Profil Daerah 135**
 - Potensi dan Masalah Ekonomi 136
 - PDRB Per Kapita 137
 - Pertumbuhan Ekonomi 138
 - Populasi 138
 - Ketenagakerjaan 140
 - Infrastruktur dan Investasi 141
 - Posisi 142
- **Masalah Politik dan Sosial 142**
- **Pembangunan dan Infrastruktur 144**
 - Visi dan Misi 144
 - Visi 145
 - Misi 146
 - Strategi 146
 - E-government via Simpekab 149
- **Struktur APBD dan Masalah Keuangan Publik 153**
- **Kapasitas Institusi dan Ketersediaan Sumber Daya Manusia 156**
 - Peraturan Pemerintah Daerah 157
 - Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia 158
- **E-Government 159**
- **Rangkuman 161**

BAGIAN 3

Strategi Membangun Daerah

7

Strategi Pengembangan Fundamental Ekonomi Daerah 133

- **Peran Pemerintah 133**
- **Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Daerah 171**
 - Wirausaha 171
 - Koordinator 172
 - Fasilitator 173
 - Stimulator 173
- **Kebijakan Pembangunan Indonesia 175**
 - Amanat Konstitusi Untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial 175
 - Sistem Perekonomian Indonesia 176

Cabang-cabang Produksi Penting dan Peranan BUMN 178

Kekayaan Sumber Daya Alam 181

- **Sasaran Penyusunan Fundamental Ekonomi Daerah 181**

- **Kerangka Konseptual 183**

- **Indikator Fundamental Ekonomi Daerah 187**

Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita Daerah 187

Indikator Pembangunan Manusia (IPM) untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota 188

- **Klafikasi Daerah Provinsi Berdasarkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan per Kapita 191**

- **Tipologi Daerah Berdasarkan IPM dan Pendapatan Per Kapita 196**

- **Tipologi Daerah Berdasarkan IPM, Kemiskinan, PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah 196**

- **Rangkuman 198**

8

Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antardaerah 200

- **Pola Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 201**

- **Ketimpangan Antardaerah 203**

- **Apakah Hipotesis Kuznets Berlaku di Indonesia? 206**

Ketimpangan Daerah dengan Indeks Theil 207

Bukti Empiris Hipotesis Kuznets di Indonesia 218

- **Growth vs Inequality di Kabupaten Banyumas 221**
 - Pola dan Struktur Ekonomi Kabupaten Banyumas 223

Ketimpangan Ekonomi Antardaerah 225

Apakah Hipotesis Kuznets Berlaku di Kabupaten Banyumas? 229

- **Rangkuman 231**

9

Strategi Penanggulangan Kemiskinan 235

- **Indikator Kemiskinan 235**

Garis Kemiskinan BPS 236

Indeks Keparahan dan Kedalaman Kemiskinan 238

- **Trend dalam Indikator Kemiskinan 239**

Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin 240

Distribusi Regional Kemiskinan 241

Pola Spasial Kemiskinan Indonesia 243

- Strategi Kelompok Miskin Ketika Krisis 244
- Penyebab dan Solusi Kemiskinan 245
 - Penyebab Kemiskinan 245
 - Alternatif Solusi Kemiskinan 246
- Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia 248
- Koordinasi Antarlembaga 252
- Evaluasi Program Kemiskinan di Kota Tarakan 254
 - Kluster 1 254
 - Kluster 2 258
 - Kluster 3 259
 - Kluster 4 260
 - Dampak Program Kemiskinan di Kota Tarakan 260
- Rangkuman 261

10 Pendekatan Sektoral: Bagaimana Mengembangkan Sektor Industri? 267

- Jenis Industri 268
 - Industri Besar dan Menengah 268
 - Industri Kecil dan Rumah Tangga 270
- Identifikasi Industri Kecil 271
- Industri yang Memiliki Keunggulan Komparatif 273
- Identifikasi Kendala yang Dihadapi 276
 - Kabupaten Kulon Progo 277
 - Kabupaten Bantul 277
 - Kabupaten Gunung Kidul 277
 - Kabupaten Sleman 277
 - Kota Yogyakarta 277
- Kemitraan Antara Usaha Kecil dan Besar 277
- Rencana Strategik Pengembangan Industri 280
- Rangkuman 288

11 Pengembangan Bisnis Daerah, Industri, Perdesaan, dan Minapolitan 291

- Transformasi Struktural di Indonesia 291
- Pentingnya Pengembangan Industri Perdesaan 293
- Definisi 295
 - Industri 295
 - Industri Perdesaan 295
 - Usaha Kecil 296
 - Minapolitan 297

- Pengembangan Industri Perdesaan Kaltim 297
 - Industri Dominan di Kaltim 297
 - Metodologi Sampling 299
- Pola Industri Perdesaan Kaltim 300
- Profil Industri Perdesaan 301
 - Identitas Pengusaha 301
 - Identitas Usaha 301
 - Jumlah Tenaga Kerja 301
 - Omzet/Tahun 302
 - Permodalan 302
 - Bahan Baku 302
 - Produksi dan Pemasaran 302
 - Teknologi 303
 - Promosi 303
 - Administrasi 303
 - Persaingan Bisnis 304
 - Kemitraan 304
 - Koperasi 304
- Pengembangan Megaminapolitan Malut 304
 - Strategi Pengembangan Megaminapolitan 307
 - Strategi Pengembangan Industri Perikanan dan Kelautan 310
 - Strategi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Malut 312
- Rangkuman 314

12 Strategi Pengembangan Kawasan Strategik atau Andalan 317

- Kebijakan Kawasan Pengembangan Strategik 318
 - Metode 318
 - Kriteria 319
 - Lokasi 319
 - Orientasi 321
 - Metode Kluster 322
 - Pengembangan SREC 322
- Analisis Kawasan Andalan di Provinsi Kalimantan Selatan 323
 - Analisis Tipologi Daerah 324
 - Analisis Location Quotient (LQ) 326
 - Analisis Spesialisasi Regional 328
 - Perbedaan Kinerja Perekonomian Kawasan Andalan dan Kawasan Bukan Andalan 331
- Rangkuman 334

13 Kawasan Perdagangan Bebas dan Masa Depan Batam 338

- Berawal dari Habibie 338
- Daya Tarik Wilayah Batam 340
- Batam sebagai Bagian dari "Growth Triangle" Sijori 341
- Perkembangan Bisnis dan Ekonomi Batam 343
- Batam sebagai Sentra Industri Terkemuka 345
- Masalah Penduduk dan Sosial 350
- Masa Depan Batam 351
- Dampak Pengganda FTZ 353
- Rangkuman 355

14 Good Governance dan Korupsi Multitingkat 357

- Makna "Governance" 357
- Survei Literatur 358
 - Teori Governance 358
 - Analisis Berbasis Biaya Transaksi (Transaction Cost Analysis) 359
- Respons Daerah Terhadap Kebijakan Desentralisasi dan Pengaruhnya Terhadap Lingkungan Bisnis 365
 - Kota Yogyakarta (Industri Kerajinan Perak) 365
 - Kabupaten Bantul (Industri Keramik) 366
 - Kota Makassar (Industri Jus Markisa) 367
- Masalah Kelembagaan Dalam Transisi Otonomi Daerah 368
 - Pengaruh Kelembagaan terhadap Kondisi Bisnis di Daerah 368
 - Model Regresi Logistik Binomial 368
- Kerangka Global Perubahan Kelembagaan 370
 - Proses Pembuatan Kebijakan 371
 - Peran dan Tanggung Jawab Agen Pemerintah di Semua Level 372
 - Struktur Insentif Pelayanan Publik 374
 - Meningkatkan Karangka Kerja Hukum untuk Menekan Biaya Transaksi 375
- Indeks Persepsi Korupsi 377
- Rangkuman 382

BAGIAN 4

Peluang Mengembangkan Bisnis Daerah

15 Bagaimana Menarik Investasi dan Memasarkan Daerah? 386

- Obsesi Daya Saing 387
- Tren Investasi di Indonesia 388
- Investasi Menurut Daerah 390
- Iklim Bisnis di Daerah 394
- Peran Pemda 396
- Bagaimana Memasarkan Daerah 397
 - Image Marketing 397
 - Attraction Marketing 398
 - Infrastructure Marketing 399
 - People Marketing 399
- Studi Kasus Pariwisata di Kabupaten Bantul, DIY 401
 - Objek Pariwisata di Bantul 402
 - Hasil Analisis 403
- Positioning, Differentiation, Brand 408
 - Konsep Dasar 408
 - Segmentasi: Melihat Investor Secara Kreatif 409
 - Targeting 409
 - Positioning 409
 - Diferensiasi: Integrasi Konten, Konteks, dan Infrastruktur 409
 - Brand: Menghindari Jebakan Komoditas 410
 - Pemasaran Daerah Sulawesi Utara 410
- Rangkuman 412

16 Pendekatan Kelembagaan dalam Pengembangan Bisnis dan Masyarakat 416

- Interaksi Antara Bisnis dan Masyarakat 416
- Mencari Strategi Pembinaan UKM 418
- Pola Pembinaan Pariwisata Berbasis Usaha Kecil 421
 - Aspek Legal sebagai Kerangka Dasar 422
 - Strategi Kebijakan Pengembangan Usaha Kecil 422
- Pembangunan Masyarakat Perdesaan 423
 - Permasalahan Umum 423
 - Perencanaan Pembangunan Desa 425

BAGIAN I

- Gerakan Desa Membangun di Kabupaten Malinau 428
- Rangkuman 435

17

Peluang Bisnis di KAPET dan Percepatan Pembangunan KTI

438

- Lokasi KAPET 439
- Potensi Masing-masing KAPET 442
- Analisis Kinerja Kapet dan Non-Kapet 449
 - Analisis Regresi Logistik Binari untuk Indonesia 450
 - Analisis Regresi Logistik Binari untuk KTI 450
- Mengapa KTI Relatif Tertinggal? 451
 - Identifikasi Masalah Mendasar 451
 - Masalah Desain Makro 452
 - Masalah Kelembagaan 452
- Strategi Percepatan Pembangunan KTI 454
- Rangkuman 456

18

Epilog: QUO VADIS OTDA? 459

- Beberapa Isu Sentral dalam Pelaksanaan OTDA 459
- Demam Otonomi Khusus 463
 - Desentralisasi Asimetris 464
 - Menggugat Bagi Hasil Migas 465
 - Politik Otonomi Daerah 467
- Rangkuman 467

Indeks 471

